



MEMANDANG POTRET REPUBLIK

Sejarah Indonesia
Pasca Proklamasi
dalam Komik

BASKARA T. WARDAYA, SJ & BRIGIDA INTAN PRINTINA
(Editor)

MEMANDANG POTRET REPUBLIK



**Baskara T. Wardaya, SJ
& Brigida Intan Printina**
(Editor)

MEMANDANG POTRET REPUBLIK

Sejarah Indonesia Pasca Proklamasi dalam Komik

Editor : Baskara T. Wardaya, SJ & Brigida Intan Printina
Perancang sampul : Teguh Prastowo
Perancang isi : Teguh Prastowo

Cetakan I ©2020 - AKAL BUDI MEDIA & PUSDEMA

Diterbitkan oleh AKAL BUDI MEDIA bekerjasama dengan PUSDEMA
(Pusat Kajian Demokrasi dan Hak-hak Asasi Manusia), Universitas Sanata
Dharma, Yogyakarta.

AKAL BUDI MEDIA
www.akalbudi.net
akalbudi.org@gmail.com
+62 877 7000 8384

Wardaya, Baskara T. & Printina, Brigida Intan. (Ed.)
*MEMANDANG POTRET REPUBLIK: Sejarah Indonesia Pasca Proklamasi
dalam Komik*
Yogyakarta: Akal Budi Media
Cet 1, 2020; 155 x 230 mm; 112 hal
ISBN: 978-623-91537-1-7

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Dicetak oleh @AKALBUDINetwork



Belajar Sejarah Secara Visual

Sebuah Pengantar

Sudah bukan rahasia lagi, terutama di kalangan pendidik, bahwa beberapa tahun terakhir ini minat siswa dan mahasiswa dalam bidang sejarah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sejumlah program studi perguruan tinggi, misalnya, semakin banyak diminati oleh orang-orang muda yang ingin belajar dan nantinya berkarir di bidang sejarah. Meningkatnya ketertarikan pada bidang sejarah juga terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana bisa kita lihat bersama, buku-buku dan pemberitaan media massa—baik cetak maupun elektronik—kini makin banyak yang mengangkat tema-tema sejarah.

Bersamaan dengan itu, kita juga melihat bahwa berbeda dengan generasi sebelumnya, banyak siswa dan mahasiswa sekarang lebih suka mempelajari sesuatu secara visual. Minat membaca buku-buku dan media pembelajaran yang biasa masih ada, tetapi semakin banyak pula mereka yang merasa lebih terbantu untuk belajar sesuatu melalui sarana-sarana yang sifatnya visual, entah itu dalam bentuk elektronik entah itu dalam bentuk cetak. Hal serupa juga terjadi dengan mereka yang ingin memperluas pengetahuan dalam bidang sejarah.

Selanjutnya, sekarang ini di jagad media sosial sering berseliweran berbagai “postingan” yang isinya adalah visualisasi peristiwa-peristiwa sejarah. Bentuknya bisa berupa video singkat, karikatur, gambar, foto, rekayasa foto, atau

bentuk-bentuk lain. Namun demikian, semua itu dimaksudkan untuk secara visual menyuguhkan konten (*content*) tentang sejarah yang dirasa perlu untuk disimak bersama. Dari betapa seringnya konten-konten visualisasi sejarah itu dibuat, dilihat, dan diedarkan, kita diingatkan bahwa visualisasi peristiwa atau pemikiran sejarah merupakan salah satu alternatif menarik dalam proses belajar-mengajar sejarah bagi para siswa dan mahasiswa.

Sadar akan sejumlah fenomena baru di atas, sekaligus dalam rangka memfasilitasi serta mendorong minat belajar sejarah di kalangan siswa, buku *Memandang Potret Republik* ini disusun. Isinya adalah visualisasi dari beberapa topik sejarah Indonesia Abad ke-20 yang diambil dari buku *Membangun Republik* (2017).¹ Secara khusus, buku ini membahas topik-topik sejarah periode tersebut yang menyangkut soal: relasi antar-etnis di Indonesia; kaitan antara korupsi, kolusi dan feodalisme pra-kolonial; perjuangan kaum muda yang dibuang oleh Belanda ke Boven Digul, Papua; peran pemuda dalam perjuangan revolusi kemerdekaan; serta soal bagaimana baik kaum muda maupun kaum intelektual bersama-sama berperan dalam perjuangan kemerdekaan dan setelahnya.

Semula buku ini merupakan hasil penelitian bidang sejarah tentang sejauh mana visualisasi narasi dan pandangan sejarah membantu atau tidak membantu generasi muda—khususnya mahasiswa—dalam mempelajari sejarah Indonesia. Selama satu semester kami melakukan penelitian tersebut, dan kami menemukan bahwa kegiatan mem-visualisasikan topik-topik sejarah ternyata membantu memperkuat minat mahasiswa untuk belajar sejarah, khususnya sejarah Indonesia masa kolonial dan pasca-kolonial.

Secara khusus melalui buku ini visualisasi tersebut dilakukan melalui komik digital. Dalam prosesnya, proyek

1 Baskara T. Wardaya (Editor), 2017. *Membangun Republik: Bercakap Tentang Sejarah Indonesia Bersama Sartono Kartodirdjo, Takashi Shiraishi, Benedict Anderson, George Kahin, Clifford Geertz, Daniel Lev, Goenawan Mohamad, dan Bill Liddle*. Yogyakarta: Galangpress.

visualisasi sejarah melalui pembuatan komik digital tersebut mendorong para mahasiswa peserta penelitian untuk melakukan beberapa hal sekaligus. Misalnya: (a) membaca dan menguasai materi sejarah yang ingin dibahas; (b) berusaha memvisualisasikan dalam imajinasi mereka peristiwa sejarah tersebut secara kontekstual; (c) mempelajari teknik pembuatan komik digital; dan (d) secara kreatif dan artistik mewujudkan visualisasi peristiwa sejarah yang dibahas dalam bentuk komik digital. Selain itu, mengingat bahwa proyek pembuatan komik digital tersebut dilakukan secara kelompok, para mahasiswa juga menjadi terdorong untuk berdiskusi tentang sejarah, selain bekerjasama satu sama lain sebagai kelompok. Dengan demikian, dalam satu kegiatan visualisasi peristiwa sejarah itu banyak hal bisa dicapai sekaligus.

Diharapkan bahwa buku *Memandang Potret Republik* ini nantinya tidak hanya akan membantu para siswa atau pembaca pada umumnya dalam memahami sejarah Indonesia masa kolonial dan pasca-kolonial, melainkan juga bisa mendorong inisiatif-inisiatif serupa. Inisiatif-inisiatif itu misalnya mencari alternatif-alternatif baru dalam usaha untuk memahami sejarah Indonesia. Tujuannya adalah supaya generasi muda kita semakin berminat mempelajari sejarah, dan dengan demikian semakin sanggup untuk secara bersama mempersiapkan masa depan bangsa Indonesia yang semakin cemerlang.

Baskara T. Wardaya, SJ dan Brigida Intan Printina

Editor

Pendahuluan

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya buku "*Memandang Potret Republik; Sejarah Indonesia Pasca Proklamasi dalam Komik.*" Diterbitkannya buku referensi ini bertujuan untuk melengkapi materi pembelajaran yang ada dalam mata kuliah Sejarah Indonesia Kontemporer pada Program Studi Sejarah, Universitas Sanata Dharma.

Buku ini disusun sedemikian rupa melalui serangkaian proses yang diawali dengan penelitian, diskusi kelompok, seminar presentasi serta evaluasi. Penerbitan buku komik ini bertujuan membantu mahasiswa untuk berpikir lebih dalam lagi tentang konsep dan transformasi pemikiran para tokoh (akademisi) pemerhati Indonesia pasca kemerdekaan.

Akhir kata kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan komik ini, karena keterbatasan waktu dan tenaga. Secara terbuka kami mengharapkan kritik saran serta masukan yang membangun untuk kesempurnaan buku komik ini.

Terima kasih dan selamat membaca.

Tim Penulis

Daftar Isi

Belajar Sejarah Secara Visual	3
Pendahuluan	6
• Tolak Diskriminasi Berdasar “SARA”	9
• Korupsi, Kolusi dan Feodalisme	37
• “ <i>Exorbitante Rechten</i> ” dan Boven Digul	57
• Revolusi Kemerdekaan dan Peran Pemuda	77
• Peran Pemuda dan Kaum Intelektual dalam Revolusi Indonesia	95

Tolak Diskriminasi Berdasar “SARA”

Veren Tantoh

Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. –Lao Tzu

Pada masa sekarang, masalah SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) menjadi salah satu masalah pokok di Indonesia. Jika tidak ditangani dengan baik, masalah tersebut dapat menghilangkan rasa solidaritas antara sesama warga masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk masalah SARA adalah masalah rasialisme. Menurut KBBI rasialisme adalah prasangka berdasarkan keturunan bangsa; perlakuan yang berat sebelah terhadap (suku) bangsa yang berbeda-beda dan suatu paham bahwa ras diri sendiri adalah ras yang paling unggul.

Rasialisme berdampak buruk bagi solidaritas masyarakat Indonesia, terutama generasi muda yang seharusnya dapat menjalin solidaritas dan menjunjung tinggi nilai persatuan Indonesia akan tetapi hal tersebut hanya sebagai pondasi yang sirna akibat rasialisme. Contoh kasus rasialisme anak muda pada saat ini yaitu adanya penolakan untuk bermain bersama terhadap kelompok tertentu, menghina dengan kata-kata merendahkan yang menunjukkan sebuah gejala kebencian sosial, atau adanya komentar di media sosial yang menyatakan ketidaksukaan terhadap kelompok tertentu dan lain-lain.

Rasialisme yang sering terjadi pada kelompok minoritas Indonesia sangat sering dilakukan terhadap kelompok etnis peranakan Tionghoa. Pada abad 20 banyak terjadi sentiment anti-Tionghoa yang berakibatkan kekerasan terhadap orang-orang Tionghoa, pembakaran rumah-rumah milik orang Tionghoa, pencurian harta benda milik orang Tionghoa dan lain-lain. Contoh kasus yang paling fenomenal adalah kasus Tragedi 1998.

Masalah rasialisme dengan jelas diungkapkan oleh seorang pakar politik Indonesia, yaitu Daniel Lev (1933-2006). Lev bercerita tentang orang Tionghoa yang dalam sejarah Indonesia sering dikambing hitamkan pada tahun 1950-an. Mereka sering dianggap sebagai pengikut komunisme. Contohnya adalah tuduhan terhadap Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) yang pada masa itu didirikan dengan maksud untuk mencegah masalah SARA dan menyatukan solidaritas antara masyarakat Indonesia. Dalam prakteknya Baperki malah dianggap sebagai organisasi komunis, padahal orang-orang Tionghoa yang menjadi anggota Baperki mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang komunisme. Bahkan ada yang menentang komunisme. Dalam Baperki pandangan-pandangan yang berbeda tentang komunisme itu telah menimbulkan banyak perselisihan antar anggotanya. Dengan demikian tidak benar bila dikatakan bahwa Baperki itu identik dengan komunisme. Menurut Lev, pandangan-pandangan yang dimiliki Baperki itu sejalan dengan pandangan Bung Karno yang oleh Baperki dianggap sebagai sumber harapan bagi kaum minoritas.

Daniel Lev juga berpendapat bahwa PP-10 (Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1959) yang menghidupkan masalah SARA bukan dipicu oleh adanya Baperki. Menurut Lev pada saat itu sikap anti-Tionghoa muncul dari adanya sikap tentara yang memandang orang Tionghoa itu

kaya dan akan menjadi masalah besar bila ikut ke dalam pemerintahan. Oleh karena itu pimpinan tentara waktu itu yang sudah merasa diri bukan hanya sebagai pemain politik atau pemimpin politik, melainkan juga sebagai semacam perumus kebijakan politik, bermaksud memindahkan orang Tionghoa dari desa-desa dengan alasan agar memperbaiki ekonomi. Pada kenyataannya orang-orang desa tidak setuju kalau orang Tionghoa dipindahkan karena dapat merugikan mereka. Meskipun demikian tentara mengambil oper isu itu karena menganggap orang Tionghoa mendapat sokongan rakyat. Sebenarnya Bung Karno tidak menyetujui adanya PP-10 itu. Meskipun demikian ia terpaksa ikut menyetujuinya, karena lahirnya PP-10 itu tidak hanya disokong oleh Masyumi dan lain-lain, akan tetapi juga diorganisir oleh tentara. Sebetulnya tujuan pembuatan PP-10 hanya agar kegiatan ekonomi orang Tionghoa dibatasi. Dalam perkembangannya peraturan itu mendorong anggapan bahwa orang Tionghoa itu mendominasi ekonomi Indonesia, dan oleh karena itu harus dikirim "pulang" ke Tiongkok.

Dalam rangkaian cerita bergambar di bawah ini penulis bermaksud menunjukkan mengenai masalah SARA terhadap orang Tionghoa yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Pembahasannya akan dikaitkan dengan pandangan Daniel Lev tentang masalah yang sama pada tahun 1950-an.

Suatu ketika
di depan
apartemen
Daniel Lev

Piye kabare?
nama saya Widodo

Sugeng Siang, nama saya Joko

Ni hao! nama saya
Mike Chen

Hello, my name is
Daniel Lev



Widodo:

Mempunyai rasa solidaritas yang tinggi, membenci SARA, dan mencintai negara.



Joko:

Cerdas tapi mudah terhasut teman.



Daniel Lev:

Pakar politik Indonesia, cerdas, dan baik hati.



Mike Chen:

Pendiam, Cerdas, dan terbuka.







Apa itu Chinese New Year?

Chinese New Year atau yang disebut sebagai Tahun Baru China dalam bahasa Indonesia atau yang lebih dikenal dalam bahasa Hokkian yaitu *Im-lek* (阴历), merupakan perayaan terbesar sepanjang tahun bagi masyarakat Tiongkok. Chinese New Year dikenal sebagai “Perayaan Musim Semi” sekaligus sebagai bulan pertama merayakan tahun baru. Chinese New Year umumnya dijalankan selama 15 hari, dengan puncaknya perayaan Cap Go Meh (十五暝) . Cap Go Meh sendiri berasal dari dialek Hokkian, Cap artinya sepuluh, Go artinya Lima, dan Meh artinya Malam.

新年
快乐





**Berapa banyak etnis Tionghoa
yang ada di Indonesia?**

Etnis Tionghoa di Indonesia terdiri dari 6 etnis yaitu : (1) etnis Hokkian yang berasal dari Fujian (daerah Jinmen, Xiamen, Fuzhou, dan Quanzhou); (2) etnis Kanton yang berasal dari tujuh distrik di delta S.Mutiara dan banyak tinggal di Hongkong, Vietnam Selatan, As, Kanada, Australia, Selandia Baru; (3) etnis Tiociu datang dari Chaozhou dekat perbatasan Fujian; (4) etnis Hakka yang berasal dari enam daerah di Tiongkok yaitu Taipu, Huizhou, Fengshun, Meixian, Popo dan Yongding; (5) etnis Hainan yang berasal dari Hainan; dan (6) etnis Hokchia atau Henghua yang berasal dari Putian.









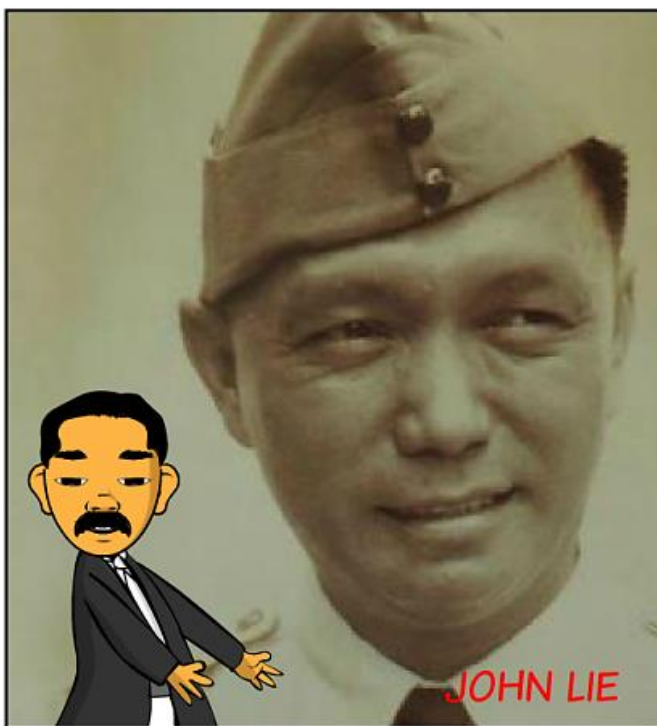
Apa itu Lumpia?

Lumpia merupakan makanan yang berbentuk bulat panjang dan renyah, digoreng serta beragam isinya. Kulit lumpia berasal dari tepung, ada juga yang terbuat dari kulit tahu. Lumpia berisi campuran sayuran (wortel, bangkuang, dan kol) akan tetapi ada juga yang berisi rebung, seperti lumpia dari Semarang.

Lumpia berasal dari kata Lun Bing (轮饼) yang dalam dialek Hokkian berbunyi *lun pia*, artinya kue bulat. Seterusnya *lun pia* beradaptasi dengan lidah lokal Indonesia sehingga menjadi lumpia sampai sekarang.







Banyak sekali.. Salah satu contohnya
yaitu John Lie, sosok pahlawan
Indonesia yang berasal dari
suku Tionghoa.





Siapa itu John Lie?

John Lie atau nama Mandarinnya yaitu 李约翰 (li Yuehan), dikenal pula dengan nama Jahja Daniel Dharma. Ia dilahirkan pada 9 Maret 1911 di Manado (Sulawesi Utara) pada masa pemerintahan Hindia Belanda. John Lie adalah seorang Perwira tinggi di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dari keturunan Tionghoa. Atas jasa-jasanya dalam membela Tanah Air, ia diberi gelar sebagai Pahlawan Nasional Indonesia.



Tidak mengherankan, Apa yang dialami orang Tionghoa pada masa ini ternyata juga terjadi di masa lalu. Sudah sejak dulu mereka ini dikambing hitamkan.

Oh yah...Ayah!

Apakah maksud Ayah
DIKAMBING HITAMKAN?

Panjang ceritanya...



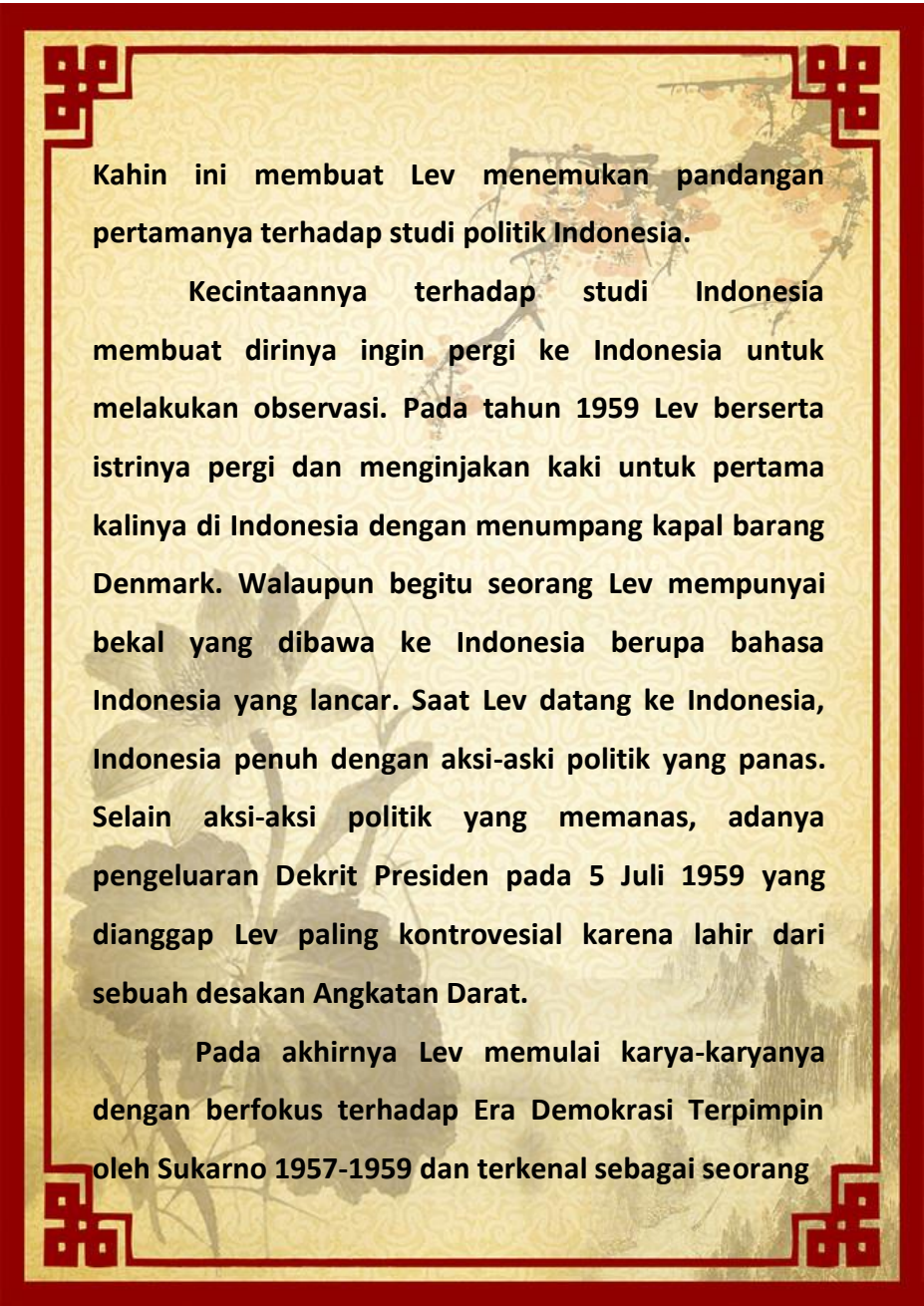


Siapa itu Daniel Lev?

Daniel S. Lev dilahirkan pada 23 Oktober 1933 silam di Youngstown, Ohio, Amerika Serikat. Pada masa kecilnya, Lev senang mengunjungi Sinagoga di Youngstown, membantu ayahnya melakukan pekerjaan dan mengikuti kompetisi tinju amatir yang bernama *Golden Gloves*.



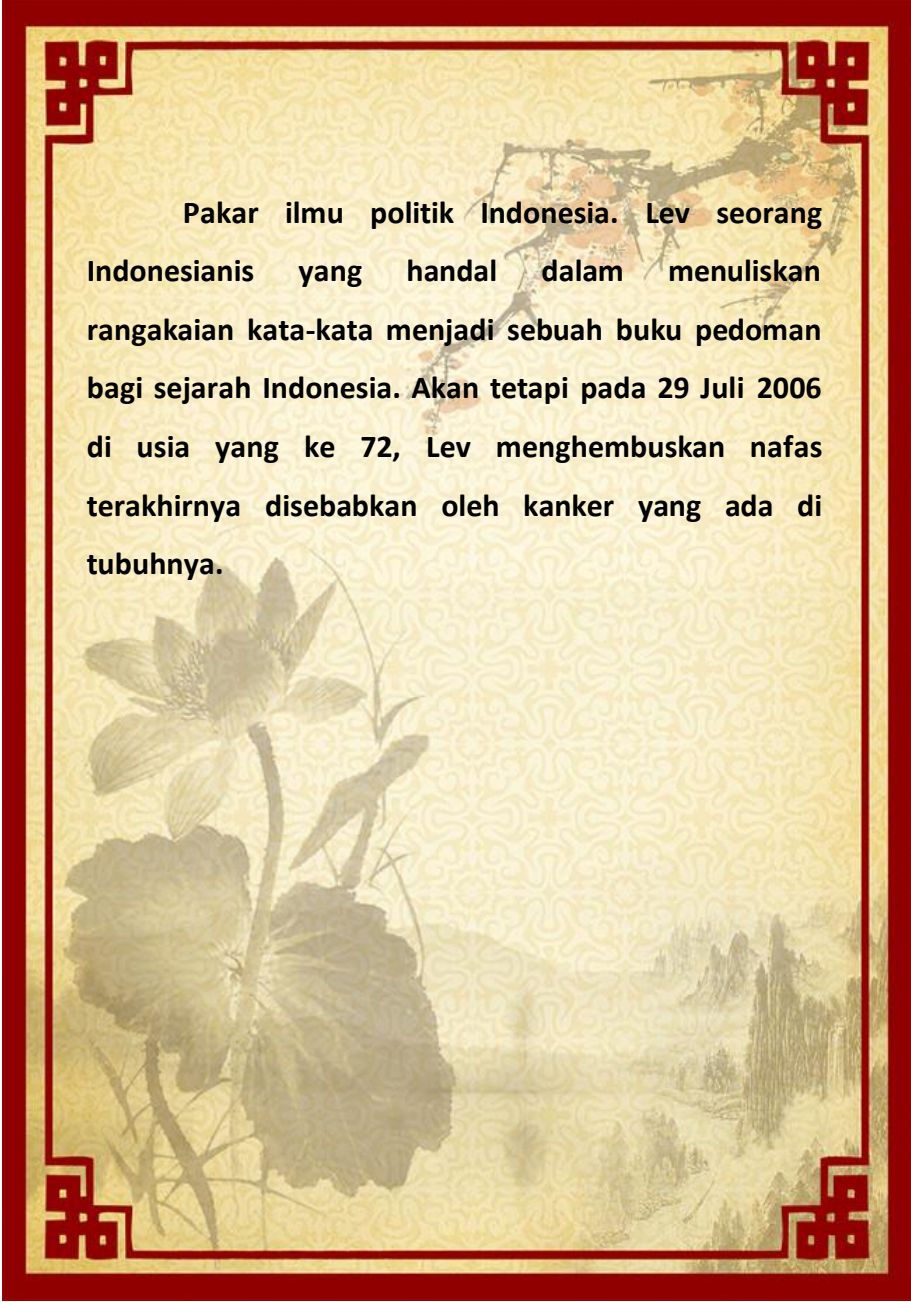
Alumni dari Miami University di Ohio tahun 1955 ini memutuskan melanjutkan studi doktoralnya di Cornell University setelah ia menikah dengan Arlene. Pada saat studi di Cornell University, Lev bertemu dengan seorang professor kajian studi Indonesia yang bernama George McTurnan Kahin. Pertemuan dengan



Kahin ini membuat Lev menemukan pandangan pertamanya terhadap studi politik Indonesia.

Kecintaannya terhadap studi Indonesia membuat dirinya ingin pergi ke Indonesia untuk melakukan observasi. Pada tahun 1959 Lev beserta istrinya pergi dan menginjakan kaki untuk pertama kalinya di Indonesia dengan menumpang kapal barang Denmark. Walaupun begitu seorang Lev mempunyai bekal yang dibawa ke Indonesia berupa bahasa Indonesia yang lancar. Saat Lev datang ke Indonesia, Indonesia penuh dengan aksi-aksi politik yang panas. Selain aksi-aksi politik yang memanas, adanya pengeluan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang dianggap Lev paling kontroversial karena lahir dari sebuah desakan Angkatan Darat.

Pada akhirnya Lev memulai karya-karyanya dengan berfokus terhadap Era Demokrasi Terpimpin oleh Sukarno 1957-1959 dan terkenal sebagai seorang

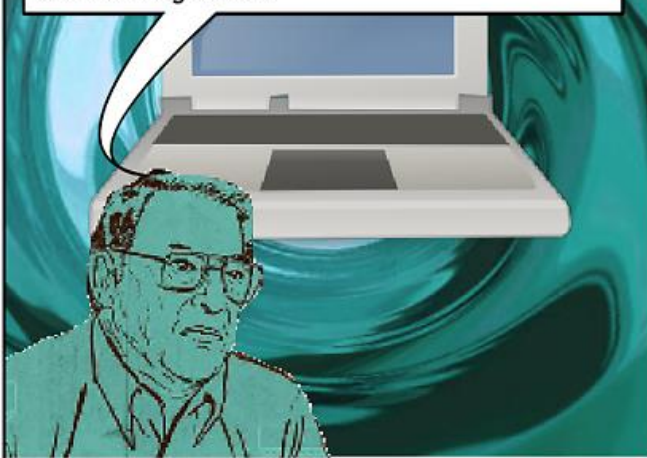


Pakar ilmu politik Indonesia. Lev seorang Indonesianis yang handal dalam menuliskan rangkaian kata-kata menjadi sebuah buku pedoman bagi sejarah Indonesia. Akan tetapi pada 29 Juli 2006 di usia yang ke 72, Lev menghembuskan nafas terakhirnya disebabkan oleh kanker yang ada di tubuhnya.

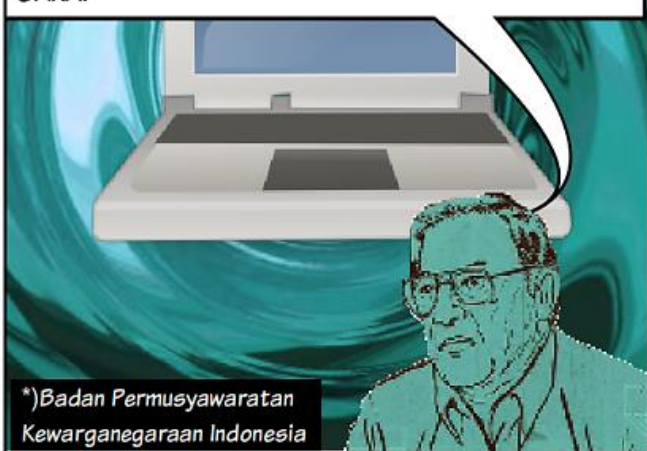




Seharusnya orang tahu bahwa sejak jaman kolonial orang Tionghoa sudah dipakai sebagai perantara untuk mencegah lahir sebuah kelas menengah pribumi Indonesia. Untuk itu orang Tionghoa dipakai sebagai perantara dan kambing hitam.



Pada tahun 1950-an masalah SARA sudah ada, khususnya masalah SARA terkait masyarakat Tionghoa. Pada masa itu muncul BAPERKI* untuk mencegah SARA. Akan tetapi isu SARA malah muncul dengan keluarnya PP-10 yang justru menghidupkan SARA.



*)Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia

Untuk PP-10 Yaitu peraturan larangan untuk orang asing yang usaha di bidang perdagangan eceran di tingkat Kabupaten ke bawah dan wajib mengalihkan usaha mereka kepada orang Pribumi. Sebetulnya orang seperti Bung Karno itu bukan Rasialis. Bahkan di Indonesia tidak ada rasialisme yang mendalam. Hanya saja waktu itu adanya pandangan bahwa orang Tionghoa itu kaya dan oleh karena itu harus dibatasi dan dikirim pulang ke Tiongkok. Lalu terbentuklah aturan ini. Pandangan seperti ini hanya berfokus pada orang Tionghoa yang selalu dikambing hitamkan.



Selain itu, diantara orang Tionghoa sendiri juga terdapat berbagai macam pandangan, Agar tidak terpecah didirikanlah BAPERKI yang tujuannya adalah untuk mempersatukan masyarakat Tionghoa dan non Tionghoa. BAPERKI semuanya diurus oleh orang-orang Tionghoa, tetapi mereka saling berbeda dalam memandang komunisme. Jadi bila menganggap BAPERKI parta Komunis itu salah.



SETELAH KELUAR DARI BAKMIE RESTO

Oh begitu, sejarah masyarakat
Tionghoa. Mereka hanya jadi
kambing hitam saja, dan
sebetulnya mereka tidak
jahat.

OK Pak Lev, thanks yah!

Iya, betul..Saya pamit
dulu yah? BYE!



KEESOKAN HARI DI PERPUSTAKAAN
SEKOLAH

Hai Mike Chen!
Hayo gabung....

Hai!..OK



Nah teman-teman gimana
cerita tadi? Sekarang kita
tidak usah mengucilkan
Mike Chen.

Iya...

Siap Joko....

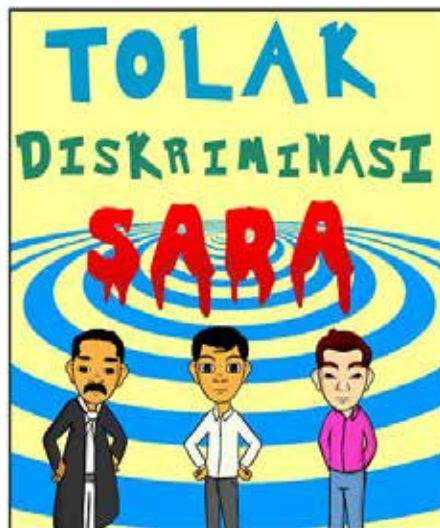




Masalah SARA bukan hanya terjadi pada kaum minoritas peranakan Tionghoa saja. Masalah itu juga terjadi pada minoritas-minoritas lain. Terjadinya tidak hanya pada jaman dahulu, melainkan juga pada masa sekarang. Sekarang ini masih banyak kasus SARA yang terjadi di Indonesia. Misalnya, terlihat adanya pembatasan tempat tinggal bagi kalangan tertentu, atau adanya penolakan yang dilakukan oleh anak muda terhadap orang-orang yang bersuku tertentu. Kasus SARA ini sangat berdampak negatif terhadap kaum muda pada generasi ini, sehingga tak jarang timbulnya tawuran yang mengatas namakan SARA.

Menanggapi hal itu, sebagai bagian dari generasi muda saat ini, marilah kita berpikir terbuka untuk mudah menerima perbedaan. Walaupun kita itu berbeda dalam hal suku atau agama, kita ini tetaplah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Marilah kita menjalankan nilai Sila Ketiga dalam Pancasila yaitu sila "Persatuan Indonesia". Apa gunanya bila kita merusak persatuan bangsa ini? Apa gunanya semboyan "Bhineka Tunggal Ika"? dan apa gunanya Sila Ketiga dalam Pancasila?. Bila sebagai warga masyarakat, kita terus-menerus bersikap egois dan benci satu sama lain.

Bangsa kita adalah bangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia. Oleh karena itu wahai para penerus bangsa, marilah kita bersama-sama menjunjung tinggi nilai "Persatuan Indonesia" dan semboyan "Bhineka Tunggal Ika" yang telah kita sepakati bersama. ☸



Referensi

Buku:

Chen, Aji, 2013, *Peranakan Tionghoa dalam Kuliner Nusantara*. Jakarta: Kompas.

Nio Joe Lan, 2013, *Peradaban Tionghoa Selayang Pandang*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).

Tim Penulis, 2006, *Etnik Tionghoa di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia.

Wardaya, Baskara T, 2017, *Membangun Republik*, Yogyakarta: Galangpress.

Internet:

<https://tirto.id/daniel-s-lev-mentor-para-pendekar-hukum-indonesia-cP1C> diunduh pada tanggal 15 Maret 2019 jam 21:29 WIB.

<https://historia.id/militer/articles/si-penyelundup-yang-humanis-DbL2P> diunduh pada tanggal 15 Maret 2019 jam 21:29 WIB.

Korupsi, Kolusi, dan Feodalisme

Christian Darren Kusnadi, Margaraetha Primayasti, dan Maria Anjelina Talu

Prof. Dr. Sartono Kartodirjo adalah salah seorang sejarawan Indonesia yang telah menyumbangkan banyak karya dan pemikiran tentang sejarah. Dia juga adalah perintis penulisan sejarah yang berorientasi Indonesia-sentris. Sebelum dia, sejarah Indonesia hampir selalu ditulis dengan orientasi *Neernaldo-sentris*. Sartono lahir di Wonogiri pada 15 Februari 1921, dan meninggal di Yogyakarta pada 7 Desember 2007 (dalam usia 86 tahun).

Sartono mendapatkan gelar sarjana pada tahun 1956 dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Pendidikannya kemudian dilanjutkan ke Universitas Yale di Amerika Serikat (lulus pada tahun 1964) dan Universitas Amsterdam di Belanda (lulus pada tahun 1966). Dari pendidikannya tersebut, Sartono banyak menghasilkan karya-karya terkenal. Salah satunya adalah *The Peasant's Revolt of Banten in 1888: Its Condition, Course, and Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia*.

Percakapan yang dibukukan ini membahas tentang pergerakan nasional dan pentingnya sejarah bagi Indonesia. Dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia, menurut Sartono, terdapat masalah yang masih merajalela, yaitu masalah korupsi dan kolusi. Apabila kita tarik kebelakang, korupsi dan kolusi sudah ada sejak zaman pra-kolonial, yakni pada periode kolonial. Sistem feodalisme yang berjalan saat itu menjadi ladang bagi tumbuhnya korupsi dan kolusi. Hal ini diperparah dengan datangnya Belanda yang menjadi salah satu alasan suburnya korupsi dan kolusi sampai sekarang.

Pembahasan dari percakapan dengan Sartono berfokus pada periode pergerakan nasional Indonesia, dengan tidak melupakan apa penyebabnya dan bagaimana dampak yang dihasilkan. Membahas sejarah tidak hanya membahas kejadian-kejadian apa saja yang terjadi di masa lalu, melainkan juga membahas apa yang dapat kita lakukan dengan sejarah tersebut agar berguna untuk kita pada masa sekarang. Disitulah letak fungsi sejarah. Itulah salah satu alasan mengapa sejarah menjadi begitu penting bagi Indonesia.

Pokok pembahasan pada tulisan ini adalah masalah-masalah yang terdapat pada masa pergerakan nasional, khususnya masalah korupsi dan kolusi, serta pengaruh VOC dan pemerintah Hindia Belanda bagi kemerdekaan Indonesia.

Dalam sejarah Indonesia, pembahasan soal masa pergerakan nasional biasanya menyangkut pembahasan mengenai nasionalisme. Sementara itu ketika membahas awal munculnya nasionalisme dalam sejarah Indonesia, biasanya perhatian kita langsung tertuju pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Meskipun demikian, menurut Sartono, sebelum kita bicara tentang Sumpah Pemuda, perlu bicara tentang Manifesto Politik tahun 1925.

Menurut Sartono ada tiga poin penting terkait dengan Manifesto Politik. Pertama, Pemerintah sendiri yang berasal dari antara tokoh yang berasal dari Indonesia. Hal kedua ialah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, tidak memerlukan adanya sebuah bantuan dari pihak manapun. Hal

terakhir yakni ketiga, adalah dalam keadaan Indonesia yang dimana terdiri dari unsur etnik tanpa adanya sebuah masalah kesatuan yang nantinya menjadi sebuah gagasan persatuan serta kesatuan (Wardaya, 2017: 3). Masyarakat Indonesia yang sangat beragam etnis dan budayanya, harus disatukan terlebih dahulu sebelum menuju kata nasionalisme. Harus ada kesadaran akan nasion dahulu sebelum sampai pada nasionalisme. Manifesto Politik, meskipun belum diketahui secara luas, tetapi semangatnya disalurkan lewat Sumpah Pemuda. Apa yang disampaikan dalam Sumpah Pemuda merupakan kelanjutan dari Manifesto Politik tahun 1925.

Feodalisme, korupsi, dan kolusi merupakan rangkaian permasalahan yang saling berkaitan. Feodalisme yang dimaksud di sini selain tata pemerintahan, adalah juga menyangkut birokrasi. Birokrasi Indonesia pada masa kolonial maupun pasca-kolonial masih meneruskan birokrasi aman Feodalis. Hal ini dapat kita lihat di mana pada masa kolonial, Belanda memanfaatkan kekuasaan bupati untuk mengontrol rakyatnya. Bupati begitu disegani oleh masyarakat sehingga Belanda memberikan kekuasaan yang begitu besar kepada bupati. Pemerintah kolonial sengaja memberikan kekuasaan yang besar kepada bupati karena sistem memerintah pemerintahan kolonial saat itu adalah sistem *indirect rule*.¹ Cara ini memang efektif bagi pemerintah kolonial yang jumlah personilnya hanya sedikit padahal dibutuhkan untuk mengatur rakyat yang jumlahnya jauh lebih besar. Dalam prakteknya, system pemerintahan *indirect rule* seperti itu mendorong terjadinya korupsi dan kolusi. Menariknya, setelah Belanda hengkang dari Indonesia, korupsi dan kolusi itu terus berlanjut.

Dalam sistem pemerintahan tak langsung yang digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda, masalah tata

1 *Indirect Rule System* adalah cara memerintah yang diterapkan oleh pemerintah kolonial dalam mengontrol masyarakat saat itu. Jumlah personel yang sedikit harus dapat mengatur jumlah rakyat yang sangat banyak. Oleh karena itu, pemerintah kolonial mengatur rakyat melalui bupati.

tertib, pengumpulan pajak, penanaman hasil agraria untuk ekspor, pengerahan tenaga kerja, dan lain-lain diserahkan kepada pejabat pribumi (Gautama, 2018: 97). Praktek seperti ini mendorong bertambah besarnya peranan penguasa lokal seperti Bupati, Priyayi, dan lain-lain dalam masyarakat. Mendapatkan wewenang untuk mengumpulkan pajak dan mengatur hasil agraria membuka pintu yang sangat lebar bagi mereka untuk melakukan manipulasi harga yang berujung pada praktek korupsi.

Terkait dengan masalah kolusi, sejak masa feodal, banyak kerabat kraton yang ditunjuk oleh raja setempat untuk memimpin daerah-daerah yang jauh dari pusat kerajaan. Alasannya terkait dengan masalah kepercayaan. Lagipula, saat itu raja sangat berkuasa sehingga dapat menentukan dan mencabut posisi para pejabat daerah sesuka hati. Kekuasaan raja yang begitu besar tentu sesuai dengan konsep kekuasaan raja saat itu. Seorang raja dapat diangkat karena dianggap memiliki wahyu kerajaan, yang “berasal dari Tuhan”. Konsep ini sekaligus menjelaskan kekuasaan mutlak raja dan menganggap perlawanan terhadapnya sebagai “perlawanan terhadap Tuhan” (Gautama, 2018: 11). Konsep kekuasaan raja seperti ini sangat mirip dengan konsep kekuasaan raja di Eropa pada abad pertengahan. Untuk konteks zaman sekarang konsep seperti ini tentu sudah tidak tepat. Indonesia yang sudah merdeka menganut asas demokrasi, di mana pilihan berada ditangan rakyat. Dalam Indonesia merdeka, penentuan pemimpin yang hanya berdasar pada penunjukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Selain masalah di atas, kita tidak boleh melupakan bahwa terdapat negara asing yang juga ikut berperan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Amerika Serikat, misalnya, adalah salah satu negara yang banyak mempengaruhi hasil perundingan antara Indonesia dengan Belanda, terutama setelah proklamasi kemerdekaan. Pengaruh Amerika Serikat masih terasa sampai pada masa Perang Dingin, di mana Indonesia sangat dipengaruhi dan mempengaruhi Amerika Serikat pada periode tersebut.

Pembahasan mengenai Feodalisme, Korupsi, dan Kolusi dalam masa pergerakan nasional sangat menarik untuk diperdalam. Konteks permasalahan yang terjadi masih relevan untuk dipelajari sampai sekarang. Berbagai masalah yang kompleks di negeri ini harus dilihat sampai pada akar permasalahannya. Baru kemudian dicari solusinya. Di sini letak pentingnya sejarah bagi Indonesia.

Masalah korupsi dan kolusi yang tidak diselesaikan dengan baik bisa merembet ke permasalahan lain yang lebih kompleks. Masalah kemiskinan, kejahatan, kesenjangan sosial, misalnya, saling terkait dan tidak pernah bisa diselesaikan secara tuntas karena tidak pernah dicari akar permasalahan. Secara *de facto* dan *de jure*, Indonesia sudah merdeka. Meskipun demikian, permasalahan yang terdapat di dalamnya masih sama seperti zaman feodal dan zaman kolonial.

Memang masalah korupsi dan kolusi, maupun nasionalisme, tidak sepenuhnya merupakan hasil kesalahan sistem pemerintahan (yang hanya menjiplak saja birokrasi yang ada) atau masyarakat pada saat itu. Pemerintahan kolonial saat itu memang memberikan pengaruh yang kuat kepada masyarakat. Pemerintah kolonial membuat kacau sistem pemerintahan yang sudah berjalan pada awalnya. Politik *divide et impera* yang terkenal itu sangat ampuh dalam memecah belah masyarakat sehingga sangat sulit untuk bersatu.

Oleh karena itu, kita harus berterima kasih kepada pendidikan yang telah melahirkan kalangan orang-orang terdidik di Indonesia. Kalangan orang terdidik ini menjadi kelompok sosial baru yang berpengaruh dalam perjalanan pergerakan nasional dan proses pembentukan nasionalisme. Meskipun pada mulanya pendidikan hanya terbatas pada kalangan elite saja, dalam perjalanan selanjutnya terdapat usaha dan kesadaran di kalangan elite waktu itu untuk menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk menyatukan kekuatan guna mengusir penjajah. Bentuk nyata pendidikan

dalam usaha pembentukan nasionalisme adalah dibentuknya organisasi-organisasi modern yang sebagai tahapan baru dalam perjuangan merebut kemerdekaan (Moedjanto, 1988: 25)

Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi dan kolusi merupakan masalah yang sangat kompleks dan saling terkait satu sama lain. Feodalisme merupakan akar dari korupsi dan kolusi. Meskipun demikian, bukan hanya feodalisme saja yang menjadi penyebab, melainkan juga karena adanya praktek-praktek kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang menyebabkan situasi bertambah rumit. Mereka memanfaatkan situasi yang ada untuk melanggengkan kekuasaan.

Kaitannya dengan zaman sekarang, terutama dengan pertanyaan bagaimana cara mengatasi permasalahan korupsi dan kolusi jelas bahwa pendidikan merupakan salah satu kuncinya. Pada masa kolonial pendidikan telah berhasil mendorong kesadaran dan usaha untuk menyatukan masyarakat (lewat organisasi), dan untuk memahami situasi yang sedang terjadi, yakni situasi penjajahan. Perkembangan pendidikan yang ditandai dengan dibangunnya sekolah-sekolah di seluruh wilayah Indonesia, belum cukup untuk menyelesaikan masalah yang masih nyata hadir di hadapan kita semua. Hal ini menandakan diperlukannya suatu usaha lebih dari sebuah pendidikan. Sartono membahas kalau saat ini, perlunya dibangun suatu kebudayaan yang mampu menumbuhkan pribadi yang penuh integritas (Wardaya, 2017: 7). Tetapi, masyarakat Indonesia sepertinya tidak mengenal budaya integritas ini. Oleh karena itu, diperlukannya usaha untuk memperkenalkan budaya integritas ini.

Berdasarkan tulisan singkat ini, kami juga akan menampilkan rangkaian bergambar yang akan membahas isi dari tulisan. Pembahasan akan berfokus pada masalah korupsi, kolusi, dan feodalisme yang ada di Indonesia. Diharapkan ilustrasi bergambar yang ada dapat memberikan gambaran mengenai akar permasalahan korupsi dan kolusi yang marak di Indonesia.



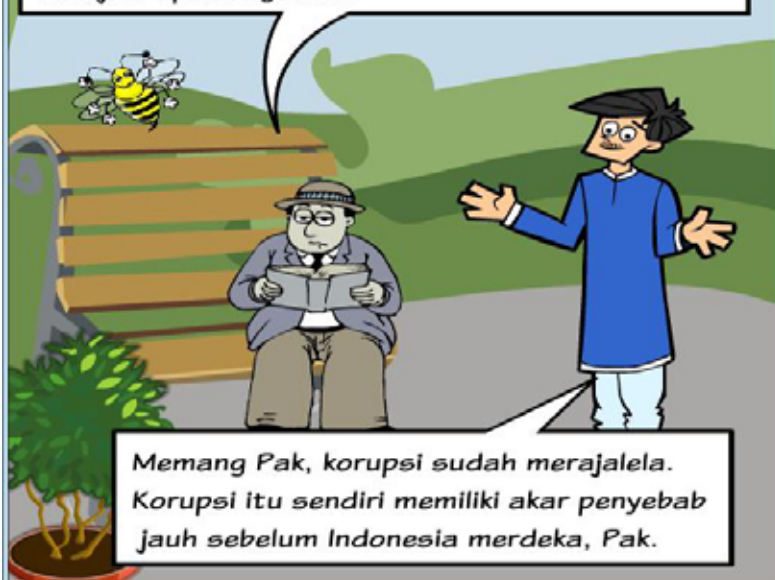
Pada suatu hari, seorang Bapak sedang duduk di taman, sambil membaca sebuah koran. Wajahnya yang kesal menarik perhatian seorang pemuda yang kebetulan melihat Bapak tersebut. Tak lama kemudian mereka terlibat dalam dialog menarik seputar kejadian yang masih merajalela di negeri ini.



Bapak itu mengeluh soal berita korupsi yang dilihatnya hampir setiap hari.



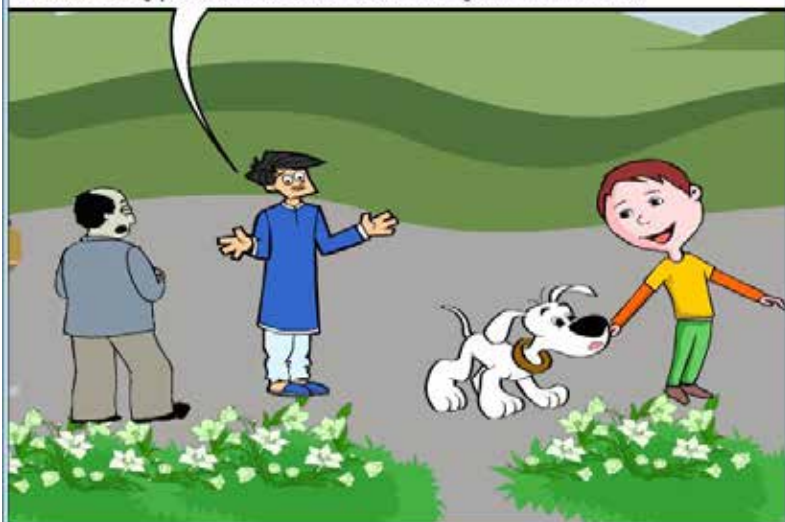
Setiap hari saya melihat ada berita korupsi dikoran.
Mau jadi apa bangsa ini?



Bapak itu terkejut mendengar pernyataan pemuda tersebut yang tidak ia kenal, tetapi tiba-tiba merespon keluhannya. Respon seperti itu jarang ia dengar, yaitu respon yang memakai sudut pandang sejarah.



Akar pertama kali korupsi dimulai di Indonesia memang belum diketahui. Meskipun demikian, semua ini ada kaitannya dengan sistem birokrasi yang kita pakai sekarang. Kita adalah negara demokrasi dengan bentuk republik. Tetapi, sistem birokrasi kita masih menjiplak birokrasi zaman Kerajaan Mataram.



Bapak itu sepertinya baru pertama kali mendengar informasi yang dikatakan oleh pemuda tadi.

Jadi, terdapat hubungan antara sistem birokrasi dengan korupsi?









Dalam hal ini, terlihat kalau Belanda juga berperan dalam melanggengkan sistem pemerintahan feodal demi kekuasaannya di Hindia Belanda.

Saya mengerti, karena Belanda terus memanfaatkan cara mereka memerintah sehingga kita hanya menjiplak saja birokrasi yang ada.

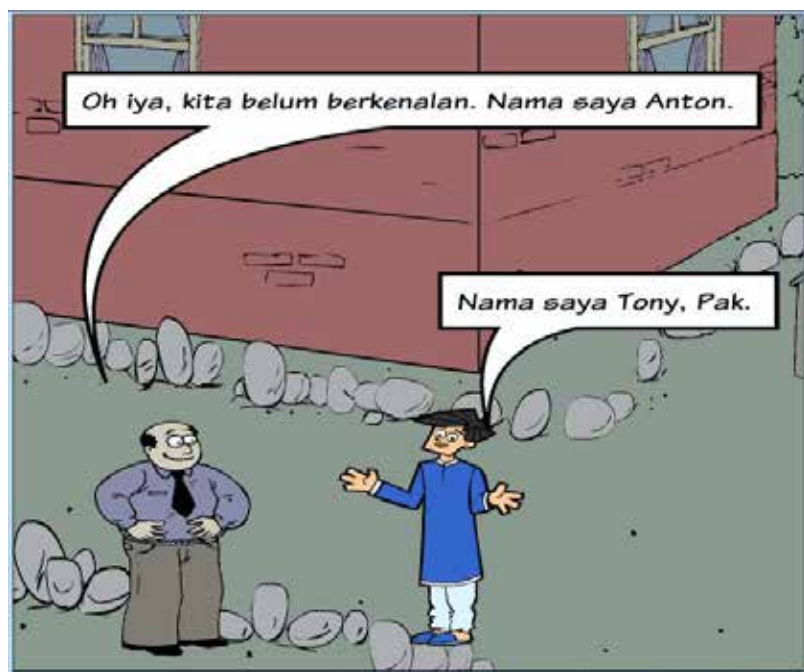
Betul Pak, kurang lebih seperti itu.

Dalam memerintah Hindia Belanda yang jumlah penduduk dan wilayahnya sangat luas, Belanda menerapkan Indirect Rule System atau sistem pemerintahan tidak langsung. Maksudnya adalah Belanda tidak mengontrol seluruh rakyat Hindia Belanda secara langsung, melainkan memegang bupati dan penguasa setempat. Para bupati ini diberikan kekuasaan yang luar biasa oleh Belanda.









Perjalanan sejarah panjang bangsa kita menghadirkan masalah-masalah yang kompleks. Kurangnya kesadaran akan sejarah bangsa kita sendiri menyebabkan masalah korupsi dan kolusi terus berkembang. Korupsi dan kolusi yang ternyata memiliki akar permasalahan jauh sebelum masa kemerdekaan Indonesia, perlu ditindaklanjuti secepatnya.



Daftar Pustaka

- Wardaya, Baskara T. (2017). *Membangun Republik*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Gautama, Candra. (2018). *Ong Hok Ham: Wahyu Yang Hilang Negeri Yang Guncang*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- G. Moedjanto. (1988). *Indonesia Abad Ke-20 Jilid 1 edisi kedua*. Yogyakarta: Kanisius.

“Exorbitante Rechten” dan Boven Digul

**Takashi Shiraishi tentang Digul Sebagai
Signpost**

**Ageng Pasek Dharmajati, Toga Daniel
Harianja, dan Galib Garibaldy**

Takashi Shiraishi lahir di Ehime, Jepang, pada 1950. Dia merupakan lulusan dari Universitas Tokyo, jurusan Hubungan Internasional, tahun 1972. Lantas pada 1986, Shiraishi meraih gelar Ph.D. bidang sejarah dari Universitas Cornell, Amerika Serikat. Ia juga pernah mengajar di Universitas Tokyo (1979-1987), Universitas Cornell (1987-1998), Universitas Kyoto (1996-2005), dan Institut Pascasarjana Nasional untuk Studi Kebijakan (GRIPS) di Tokyo (2005-2009). Dia menjabat sebagai Anggota Eksekutif, Dewan untuk Kebijakan Sains dan Teknologi (CSTP), Kantor Kabinet (2009-2018) dan Profesor Universitas Ritsumeikan (2017). Dia saat ini menjabat sebagai Kanselir, Universitas Prefektur Kumamoto sejak tahun 2018.

Takashi Shiraishi pernah diwawancari mengenai tempat pembuangan yang pernah ada di Indonesia sekitar tahun 1920-1930an. Tempat tersebut bernama Digul, Maluku. (Sekarang Papua Nugini).

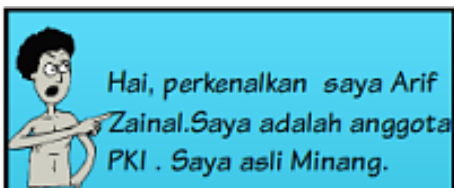
Boven Digul merupakan suatu nama tempat yang terkenal di masa Kolonial Belanda. Tempat ini pun berperan sebagai fasilitas penahanan bagi para pelaku pemberontakan yang dianggap sebagai musuh utama atau yang “mengganggu” pemerintah Hindia Belanda. Boven Digul mulai digunakan sekitar tahun 1920-an yang awalnya berperan sebagai penjara bagi pemberontak Partai Komunis Indonesia (PKI). Kemudian, pada tahun-tahun selanjutnya digunakan sebagai tempat menahan para pemberontak dari partai-partai lainnya di Hindia Belanda.

Sebagian dari Kisah Boven Digul yang kami sajikan dalam komik berikut berkisah tentang bagaimana keadaan serta suasana yang dialami oleh masing-masing pemberontak khususnya dari perspektif Pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1920 Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Van de Graaf mendapat desakan dari dewan Hindia Belanda untuk segera mencegah potensi membesarnya pemberontakan yang akan dilakukan oleh PKI. Keadaan yang mendesak ini membuatnya berdiskusi dan akhirnya mendapat ide dari kakaknya yang bernama Schrieke. Schrieke menyampaikan ide kepada Adiknya Van de Graaf untuk membuat sebuah tempat pembuangan terhadap orang-orang pemberontak dan juga melakukan sebuah kerja sama kepada mereka dengan cara paksa.

Sedangkan di sisi lain, para tahanan yang terbuang ke Boven Digul ternyata tidak berhenti menyusun perlawanan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Para tahanan yang dibuang ke Digul pada akhirnya menciptakan sebuah koalisi yang terdiri dari berbagai macam orang dari berbagai daerah. Salah satu kelompok yang terdiri dari “tiga serangkai”, yakni : Seto Kancimai, Zainal Arifin, Arif Suyatno. Ketiga orang ini memiliki latar belakang yang berbeda selama bertahan hidup di Digul. Pertemuan kelompok ini di Digul pun berawal

dari keterlibatan mereka terhadap PKI. Seto Kancigmai yang merupakan seorang loyalis PKI, menganggap kebijakan pemerintah Hindia-Belanda merugikan kaum buruh sehingga ikut melakukan perlawanan terhadap pemerintah, pada akhirnya ia ditangkap dan dibuang ke Digul bersama anggota PKI lainnya. Sedangkan Arif Suyatno yang juga seorang loyalis PKI, tertangkap karena terlibat melakukan pemberontakan terhadap pemerintah di daerah Jawa Tengah. Kemudian operasi Digul akhirnya semakin menyebar hingga ke Minang, Sumatera Barat. Operasi ini dipimpin oleh ketua PID (polisi dinas rahasia Belanda) yang bernama Van der Lely. Berhasilnya operasi besar-besaran ini juga membuat tertangkapnya para petinggi PKI, salah satunya Zainal Arifin. Operasi Digul pun dilakukan dalam dua tahap, dimulai dari tanah tinggi ke tanah merah. Tanah tinggi diperuntukkan bagi tahanan yang memiliki status sosial yang tinggi dan tanah merah digunakan untuk para tahanan yang melakukan kejahatan tingkat atas. Zainal Arifin yang mulanya dibuang ke tanah tinggi karena notabene sebagai petinggi PKI, kembali dibuang oleh PID ke tanah merah karena dianggap tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda.

Cerita selanjutnya juga akan mendeskripsikan konsep sistem dari pemerintah Belanda tentang penjara yang “baik” ini. Kata “penjara” yang selama ini kita kenal dengan konotasi buruknya terkait dunia perang, diharapkan akan berubah jika setelah membaca kisah tentang Boven Digul dari perspektif Pemerintah Hindia Belanda yang sebenarnya menginginkan diplomasi dan perdamaian tanpa adanya pertumpahan darah.



Hai, perkenalkan saya Arif Zainal. Saya adalah anggota PKI . Saya asli Minang.



Hai, perkenalkan saya Seto Kangcimai. saya adalah anggota PKI dan teman baik Arif dan Zainal. saya asli Banten.



Hai, perkenalkan saya Arif Suyatno. Saya juga salah satu anggota PKI. Saya asli Jawa Tengah.



Hai, perkenalkan saya Van De Graaf. saya berasal dari Belanda dan saya adalah Gubernur Jenderal Belanda.



Hai, perkenalkan saya Van Der Lely. Saya berasal dari Belanda. Saya adalah ketua dinas polisi rahasia Belanda.



Hai, Perkenalkan saya anggota dewan Hindia Belanda. saya juga bawahan Jenderal Van De Graaf. Saya berasal dari Belanda.



Hai, perkenalkan saya Letnan Becking. Saya berasal dari Belanda. Saya adalah tentara kepercayaan Van De Graaf.

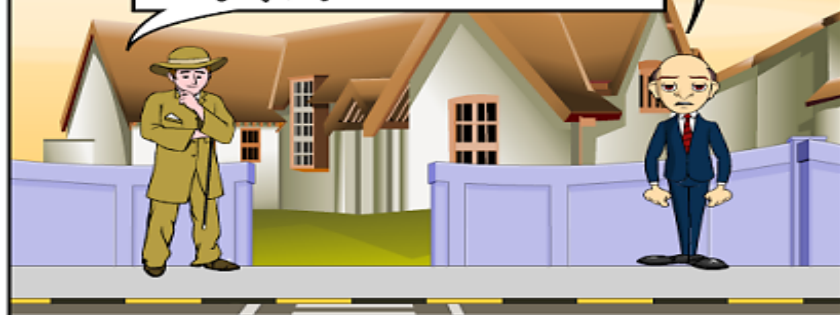


Hai, perkenalkan saya Schriekke. Saya berasal dari Belanda. Saya adalah kakak kandung dari Van De Graaf.

Ada berita apa hari ini, Mas ?

Lapor pak, situasi kurang bagus, para pemberontak sudah terlalu jauh melewati batas, Bapak sebaiknya lebih tegas lagi.

Hmm, ini berbahaya jika kita biarkan terus. Tenang saja, saya akan mencari solusi.



Para pendengar yang baik, Situasi terkini dari beberapa daerah sedang mengalami kesulitan dalam mengurangi potensi pemberontakan dari PKI, Kita harus berbuat sesuatu.







Beberapa saat setelah pembuatan rencana Digul

Selamat siang. Ada apa kamu kemari?

Saya datang ke sini untuk menyampaikan pesan dari Gubernur untuk membentuk PID. Juga untuk memata-matai orang-orang yang mencurigakan sebagai pemberontak.

Lalu setelah itu?

Kita bernegosiasi dengan mereka, karena mereka juga pintar.

Ajudan, tugas kamu selanjutnya membentuk PID dari beberapa polisi kita.

Untuk apa tuan?

Supaya para pemberontak dapat diawasi dari PID tersebut. Kita perlu mengajak mereka bekerja sama.

Oke. Siap melaksanakan, tuan.





Beberapa hari setelah Operasi PID di Banten, Pemerintah Belanda juga gencar melakukan penangkapan di berbagai daerah lain. Contohnya Sumatera Barat, Jawa Tengah.

Tampak situasi di Digul.

Tempat ini terlihat seram.
Ini sepertinya Digul yang
digosipkan orang-orang.

Iya, sepertinya mas Arif benar.
Tempat ini sangat terpencil.

Aku yakin Belanda punya sesuatu dengan
membawa kita ke sini. Semoga kawanku yang
lain baik-baik saja.



Sementara itu, situasi Digul Bagian Sumatera Barat.

Pak, kita dimana sekarang?

Ini tempat penjara kalian, untuk sementara kalian akan ditempatkan
di sini sesuai sistem Digul. Tenang saja, kami tidak melakukan
kekerasan!

Tapi tetap saja kalian Belanda licik, bermain dengan cara ini.
Maaf tapi kami tetap bertahan dalam keadaan apapun!

Terserah. pilihan ada di tangan kalian!



PID selanjutnya mengumpulkan para tahanan PKI dan mengawasi mereka dengan ketat. Bersamaan dengan itu, ada seorang Petinggi PKI bernama Zainal Arifin yang berasal dari Sumatera Barat berencana memanfaatkan situasi yang ada.



Gerakan yang pintar nan licik, Belanda sudah berada di satu langkah depan kita.

Tepat sekali, tapi kamu tetap punya cara menghambat mereka kan?

Ya, selama kita melakukan gencat senjata dan Belanda memegang janjinya untuk tidak melakukan kudeta. Rencana kita pasti lancar!

Apa yang membuat kamu optimis seperti itu ?







Operasi Van Der Lely yang matang membawa kegagalan kepada rencana Zainal Arifin yang menyusun perlawanan. Kegagalan rencana dia berujung ke pembuangan Tanah Merah dimana tempat itu dihuni tahanan politik tertentu. Tempat itu pun mempertemukan Zainal dengan teman lamanya yakni, Arif Suyatno dan Seto Kangcimai.



Dua Minggu setelah berjalannya Operasi Digul, Tanah Merah

Saya sepertinya pernah melihat kalian berdua.
Kalian Seto dan Kangcimai, kan ?

Iya benar sekali. Kamu Zaenal Arifin kan ?
Sudah lama tidak bertemu.

Iya, kita bertiga juga ditangkap dalam
hal yang sama.







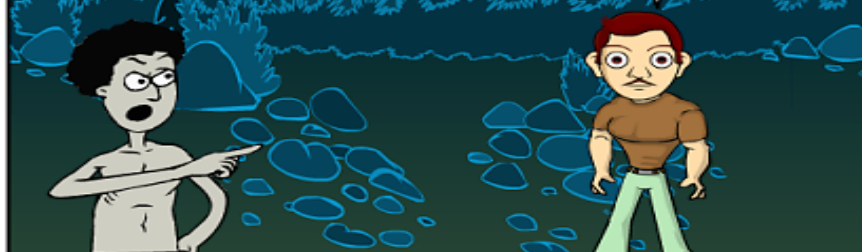
Malam hari setelah terjadinya debat tiga serangkai

Permisi, kalau boleh aku ingin membicarakan sesuatu tentang PID dan De Graaf.

Silahkan saja, tapi singkat!

Aku dan temanku setuju untuk bekerja dengan kalian, asal dengan syarat kehidupan layak.

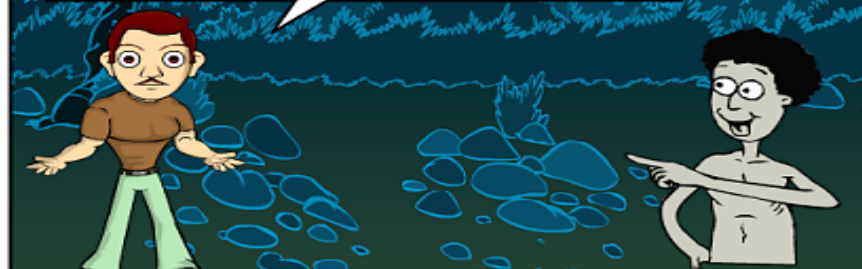
Boleh saja, selama kalian tidak mengacau program Digul.

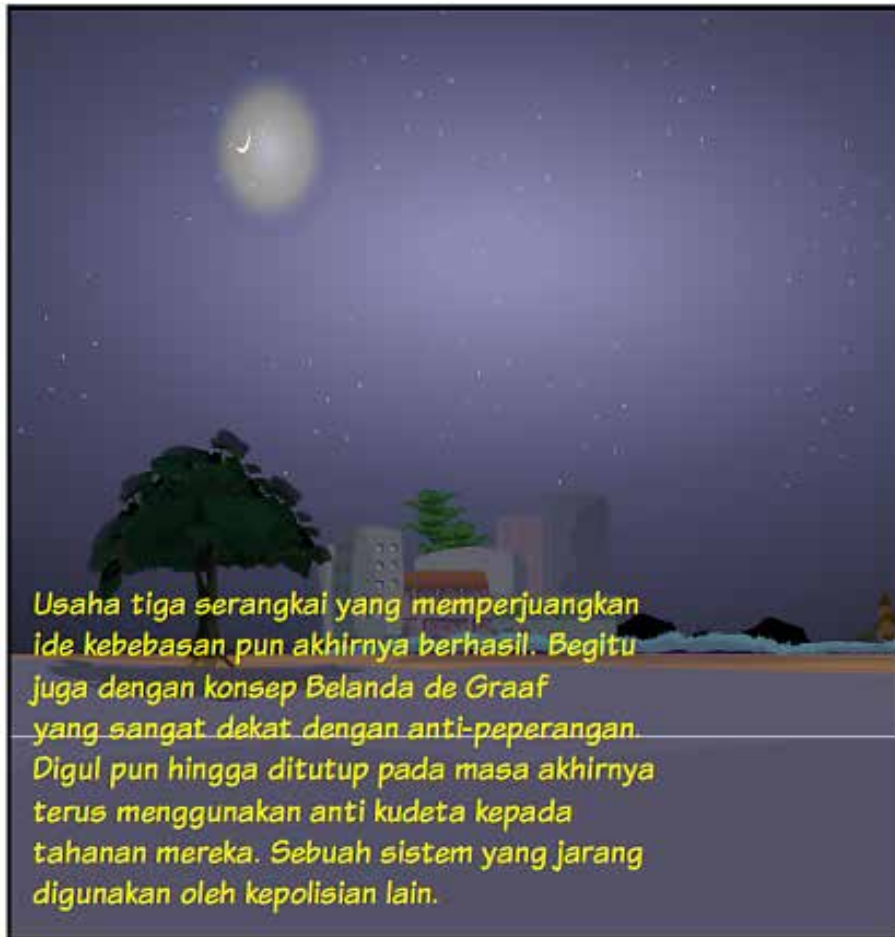


Kami Belanda pada dasarnya ingin menjauhi konflik dengan PKI karena hanya akan mempersulit posisi kami di Hindia Belanda.

Pihak kami pun berkeinginan sama andai diberlakukannya tindakan serius yang membantu buruh.

Baiklah. Tim kami akan mempekerjakan kalian dalam waktu yang ditentukan. Tapi resiko akan tetap ada. Kalian juga harus tetap menjaga fisik agar sehat.





Daftar Pustaka

Wardaya, Baskara T. (2017). *Membangun Republik*. Yogyakarta: Galangpress.

Revolusi Kemerdekaan dan Peran Pemuda

**David Julianto, Hamira Fatin Nafisyah,
dan Bogar Ardiansyah**

Benedict Richard O’Gorman Anderson (1936-2015) adalah seorang peneliti dan ilmuwan yang memfokuskan diri pada studi politik. Karyanya mengenai seluk-beluk nasionalisme menjadi rujukan lintas generasi. Ia lahir dalam keluarga yang sejak awal sudah aktif dalam pergerakan nasionalisme di Irlandia. Pada tahun 1941 keluarganya bermigrasi ke Amerika Serikat.- Ia menempuh pendidikan sarjana di Universitas Cambridge di Inggris, dan kemudian melanjutkan studinya sampai mendapatkan gelar doktor di Universitas Cornell, A.S.. Banyak karyanya berfokus pada bahasan tentang kondisi politik di Indonesia. Bahkan kritiknya atas rezim Soeharto membuatnya tidak bisa berkunjung ke Indonesia sampai berakhirnya era Orde Baru pada 1998. Dalam wawancaranya yang terekam dalam buku *Membangun Republik*, ia dipanggil akrab dengan sapaan “Pak Ben” dan dalam wawancara ini Pak Ben memberikan rangkaian gagasannya tentang pemuda, patriotisme, dan nasionalisme.

Pak Ben berpendapat bahwa periode tahun 1944-1946 adalah periode yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Dua tahun tersebut sangat intens dan penuh dengan kejadian tak terduga. Periode ini adalah waktu di mana negara benar-benar dalam kondisi yang sangat lemah, situasi semakin sulit dikendalikan bahkan oleh Presiden sekalipun. Para pemuda memanfaatkan momen ini untuk melancarkan revolusi besar-besaran.

Awal tahun 1946 menjadi saksi tumbuhnya partai-partai dari berbagai arah. Para pengikut Arif Sjarifuddin yang tergabung dalam gerakan pemuda bawah-tanah, misalnya, membentuk Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) pada bulan Desember 1945. Di sisi lain, para politisi Islam modern yang tergabung dalam Masyumi berhasil memperoleh kembali kekuasaan dari para pemimpin Muhammadiyah dan NU yang mendapat dukungan pihak Jepang. Partai Nasional Indonesia (PNI) juga bangkit kembali, tepatnya pada bulan Januari 1946. Kemunculan PNI yang saat itu tidak lagi dipimpin Soekarno, menjadikan partai ini bebas dari sisa pengaruh Jepang.

Tentang paham patriotisme yang saat itu juga mulai menggelora di benak para pemuda, Pak Ben berpendapat bahwa semangat ini merupakan hasil dari didikan Jepang mengenai *bushido* (semangat berkorban untuk kaisar). Para pemuda lantas menemukan kesadaran politik dan berbangsa yang mendorong mereka untuk melakukan pergerakan. Tentu saja juga ada perlawanan pemuda yang mengakibatkan kekacauan, sebagaimana misalnya tampak dalam pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Waktu itu orasi-orasi Bung Tomo di radio memiliki peran besar dalam membakar semangat para pemuda Surabaya untuk melakukan perlawanan terhadap sekutu. Menurut Pak Ben, waktu itu banyak pemuda di Surabaya yang bertempur hanya berbekal "restu" dari kyai-kyai, sehingga banyak dari mereka yang tumbang sia-sia. Pertempuran di Surabaya itu mengakibatkan terbunuhnya Jenderal Mallaby, sehingga

Inggris kemudian mengerahkan persenjataan berat sebagai serangan balasan. Akhirnya dengan sekejap kota Surabaya berhasil diduduki oleh Inggris, sementara para pemuda kalang kabut dan bersembunyi.

Suasana pergerakan pemuda yang terjadi pada periode 1944-1946, menurut Pak Ben, benar-benar unik dan berbeda dengan pergerakan pemuda gelombang sebelumnya. Pemuda era pada 1920-an tidak memiliki saingan yang berarti. Mereka adalah generasi perintis, insan paling "pintar" penguasa pendidikan modern. Meski pemuda era 1920-an ini juga sering berbenturan dengan generasi tua, namun yang terlihat hanyalah pertentangan antara agen modernitas dan para kaum kolot. Kasusnya berbeda bagi pemuda tahun 1945. Pada tahun itu pemuda digambarkan sebagai bentuk pergerakan radikal yang patriotis, sedangkan orang tua yang juga ikut pergerakan digambarkan sebagai pihak yang cenderung lebih hati-hati dalam bertindak. Para pemuda rela berkorban bukan untuk mengejar jabatan atau keuntungan lainnya, di sisi lain para orang tua seringkali berpihak dengan kebijakan yang memberikan keuntungan dari segi karir ataupun materi.,menjadi poin penting adalah Revolusi Pemuda pada saat pra kemerdekaan, saat merdeka, dan setelah merdeka. Pak Ben sendiri menuliskan penjelasan apa saja peran pemuda pada saat itu untuk Indonesia yang baru saja merdeka.

Sumpah Pemuda 1928 yang selalu diangkat sebagai cikal bakal pergerakan, pada saat itu tidak terlalu penting. Pada saat itu pemuda tidak memikirkan sumpah. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka mengabdikan terhadap negara adalah dengan cara bergerak, berevolusi dan melawan Belanda. Itulah gambaran pemuda saat itu Dalam semangat revolusi waktu itu para pemuda hanya mendasarkan diri pada dua keyakinan, yakni keyakinan untuk merdeka dan keyakinan untuk membebaskan penderitaan rakyat yang tertindas.

Jika melihat pertentangan antara pemuda dan kaum tua di atas, bayangan yang sering muncul adalah bayangan tentang semacam perang antar generasi. Padahal??? Terkait hal ini menurut Pak Ben perlu dibedakan antara istilah "pemuda" dan "anak muda". Istilah "anak muda" jelas mengacu pada sebuah kategori demografis, yakni anak antara umur 15-19 tahun. Sementara itu sebutan "pemuda" pada era perjuangan merupakan sebutan untuk orang-orang yang merasa terpanggil untuk ikut dalam perjuangan kemerdekaan. Laki-laki maupun perempuan yang ikut *nyemplung* dalam perjuangan itu semuanya disebut "pemuda". Dengan demikian sebutan "pemuda" pada waktu itu adalah sebutan yang sangat terhormat. Sebutan itu merupakan sebutan untuk mereka yang tergabung dalam suatu usaha untuk mendobrak pintu kemapanan guna melahirkan perubahan.

Selepas masa revolusi kemerdekaan, para pemuda tetap meneruskan perjuangan mereka melalui partai politik. Sayangnya, suara para pemuda cenderung kalah dengan para generasi tua yang memegang hampir seluruh keputusan internal partai. Pengiriman delegasi dalam pertemuan internasional juga didominasi oleh generasi tua.

Bagaimana dengan sekarang? Di manakah tempat para pemuda dalam arus globalisasi sekarang inii? Apakah istilah pemuda masih menjadi kebanggaan bagi yang menyandangnya? Tentunya kebanggaan tersebut masih ada, akan tetapi konteksnya sudah sangat berbeda. Tidak perlu jauh-jauh, seberapa sering terlihat ada "bapak-bapak" yang masih eksis sebagai anggota pemuda karangtaruna? Lebih spesifik lagi, berapa banyak kakek-kakek yang masih mengikuti pawai Pemuda Ansor? Ketika julukan pemuda sudah tidak lagi bersinonim dengan demografis muda-mudi, konsep "semangat jiwa muda" akhirnya menjadi solusi. Akhirnya muncul sebutan remaja, cerminan semangat yang

menggebu-gebu tanpa arah. Bagi para remaja, patriotisme dan nasionalisme diartikan sebagai keberanian untuk berdemonstrasi.

Benedict Anderson menyampaikan banyak hal terkait peran pemuda dalam revolusi kemerdekaan. Diterangkan misalnya bagaimana pemuda menyikapi penindasan penjajah, bagaimana pemuda bertujuan melawan penjajah melalui sikap militer, bagaimana pemuda masuk ke dalam partai politik, dan sebagainya. Lalu apa kaitannya dengan keadaan sekarang? Situasi Indonesia pada saat ini tentu berbeda dengan apa yang ada dalam wawancara ini. Kami rasa pengaruh bagi bangsa Indonesia saat ini, adalah penggambaran bagaimana semangat juang yang memiliki dua perbedaan, golongan tua yang memang sudah dari dulu sejak zaman Hindia Belanda didoktrin tentang bagaimana tetap berpikir ulang dalam memutuskan sesuatu, sedangkan golongan pemuda tidak. Hal ini sendiri disebabkan oleh golongan muda yang pada saat itu tahun 1944-1946 adalah bekas didikan Jepang, yang notabene pada saat itu dididik agar bertindak cepat (dalam konteks pendidikan militer), membuat semangat golongan muda sangat berapi-api pada saat itu.

Dalam rangkaian cerita bergambar di bawah kami bermaksud menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak dapat terlepas dari sumbangsih para pemuda. Semangat juang mereka sudah seharusnya diwarisi oleh muda-mudi penerus bangsa. Jangan hanya turun ke jalan untuk berdemonstrasi, turunlah ke jalan untuk melakukan aksi perubahan. Dengan meningkatkan kepedulian akan isu-isu terkini, generasi penerus diharapkan mampu memberikan solusi nyata yang bersifat membangun.



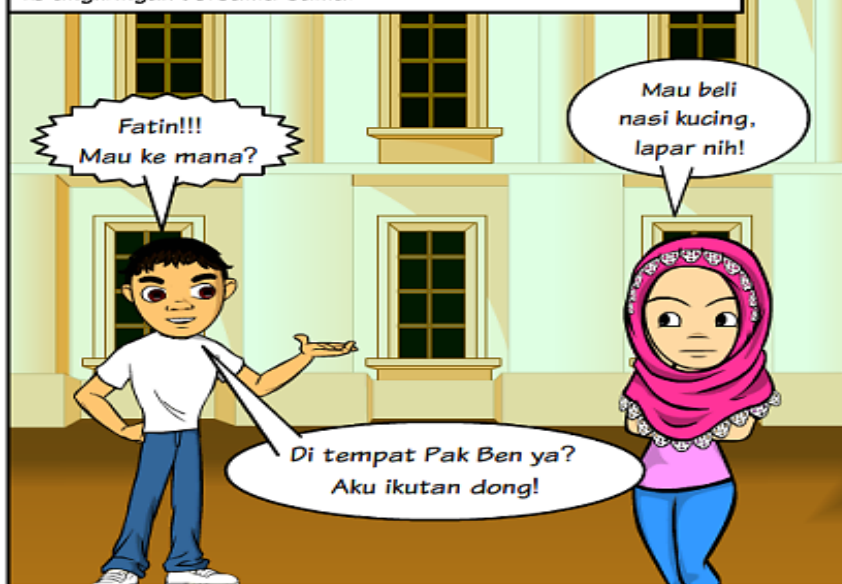
Pak Ben, pemilik Angkringan Pemuda yang penokohnya terinspirasi oleh sejarawan Benedict Anderson.

Fatin, mahasiswa yang gemar menggali pengetahuan baru. Pelanggan tetap Angkringan Pemuda.



Jul, mahasiswa kekinian dengan rasa ingin tahu yang besar. Sangat aktif mengikuti kegiatan di kampus.

Seusai kuliah maraton di Kampus Kekinian, Fatin ingin makan siang di angkringan. Tiba-tiba Jul menyapa dan keduanya pergi ke angkringan bersama-sama.











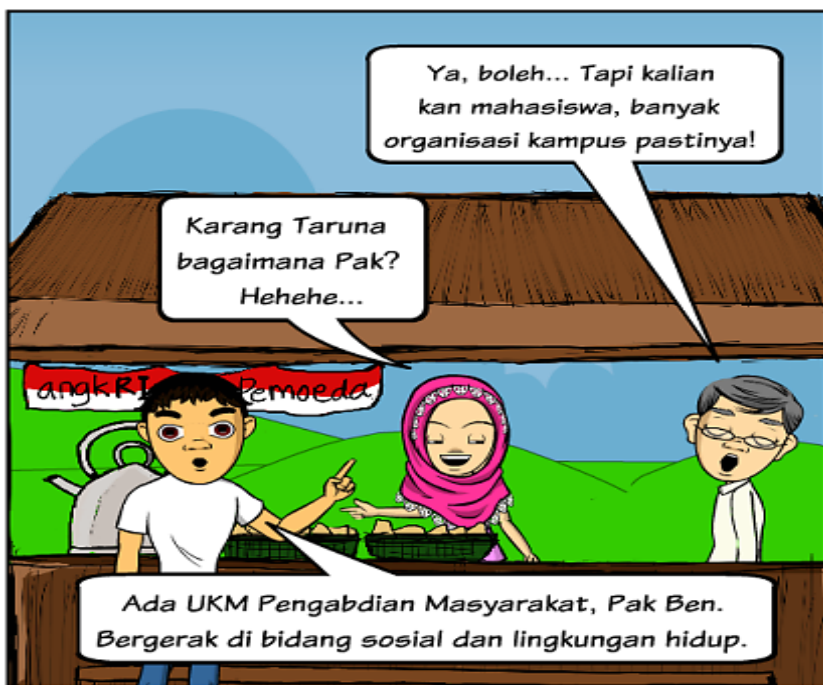












Daftar Pustaka

Wardaya, Baskara T. (2017). *Membangun Republik: Bercakap tentang Sejarah Indonesia bersama Sartono Kartodirdjo, Takashi Shiraishi, Benedict Anderson, George Kahim, Clifford Geertz, Daniel Lev, Goenawan Mohamad, dan Bill Liddle*. Yogyakarta: Galangpress.

Peran Pemuda dan Kaum Intelektual dalam Revolusi Indonesia

**Yemima Hindarto,
Ahmad Nur Wahyudin,
dan Yohannes Putra**

Dalam bab 5 buku *Membangun Republik*, Clifford Geertz membicarakan beberapa aspek penting terkait dengan masalah keberagaman yang ada di Indonesia, seperti soal Kemajekan atau Pluralitas, Revolusi Indonesia, Primodialisme, dan Nasionalisme Radikal. Nasionalisme radikal sendiri menurut Geertz muncul pasca Pemilu 1955. Kemunculannya merupakan situasi yang mendahului peristiwa '65.

Geertz juga menyinggung beberapa situasi yang terjadi pada masa pra-Revolusi, perubahan sosial-budaya yang terjadi dari mana tumbuhnya kesadaran berorganisasi, dan semangat-semangat revolusi. Menurut Geertz masa-masa revolusi juga ditandai dengan bangkitnya semangat juang tinggi kaum muda. Selain itu momen revolusi juga menjadi wadah bagi tiga partai besar yaitu Partai Nasionalis (PNI), Partai Agama (Masyumi), dan Partai Komunis (PKI).

Salah satu gagasan penting dalam bab lima buku ini, adalah pandangan Geertz mengenai masa-masa Revolusi Indonesia. Dalam wawancara, di buku ini Geertz banyak menyoroti Indonesia sebagai suatu negara yang bersifat majemuk, yakni Indonesia sebagai sebuah negara yang terdiri dari begitu banyak macam suku, agama, ras, bahasa, dan sebagainya. Kemajemukan itu, menurutnya, akan membuat setiap upaya penyeragaman dalam bentuk ideologi, agama ras, atau budaya tertentu mengalami kegagalan.

Pandangan Geertz mengenai kemajemukan Indonesia ini mempengaruhi pandangannya mengenai gerakan massa dalam Revolusi Indonesia. Menurutya, Revolusi Indonesia tak bisa secara naif dan sederhana diartikan semata-mata hanya sebagai gerakan massa. Revolusi tidak hanya sekedar masalah bebas dari penjajahan Belanda. Revolusi bukan hanya masalah perasaan anti-kolonialisme saja.

Ketika orang-orang mulai memutuskan untuk menjadi Indonesia, maka kemudian muncul masalah kelas, agama, ras, dan sebagainya. Revolusi memang sempat mengaburkan kemajemukan tersebut, namun setelah revolusi berakhir mulai muncul internal yang sulit didamaikan.

Hal menarik lainnya yang dikatakan oleh Geertz adalah pemahamannya yang berbeda dengan Ben Anderson mengenai peranan pemuda dalam Revolusi Indonesia. Anderson dalam bukunya yang berjudul *Revoloesi Pemoeda* menganggap bahwa pemuda memiliki peranan kolektif yang penting dalam revolusi Indonesia. Ia juga berpendapat bahwa pemuda adalah yang mempelopori gerakan-gerakan solidaritas baik itu di kota-kota kecil maupun di ibukota-ibukota provinsi.

Awalnya, aksi-aksi pemuda dalam revolusi itu hanya dilakukan secara simbolis seperti menempel-nempel poster ataupun mengibarkan bendera merah putih. Dalam perkembangannya, kata Ben Anderson, apa yang dilakukan itu melahirkan bertambahnya rasa percaya diri para pemuda, dan kemudian mendorong lahirnya gerakan-gerakan solidaritas.

Salah satu gerakan solidaritas itu muncul pertama kali di kota industri Surabaya dan dipimpin oleh Sumarsono bersama Ruslan Widjaja. Gerakan ini terdiri dari para pemuda dari seluruh lapisan dan golongan masyarakat (Benedict Anderson, 2018: 142). Gerakan itu kemudian ditiru oleh gerakan-gerakan serupa yang dipelopori oleh pemuda-pemuda di berbagai daerah. Sebagai kelanjutannya, menurut Ben Anderson, aksi-aksi massa pun mulai dilakukan oleh para pemuda seperti yang terjadi di Bandung, Surabaya dan Semarang.

Geertz tidak menolak pandangan Anderson. Menurut Geertz dalam revolusi Kemerdekaan Indonesia, kaum muda memang memiliki peranan penting. Namun demikian, menurut Geertz peranan yang lebih penting datang dari kaum intelektual. Menurut Geertz pentingnya peran intelektual sangat berpengaruh dalam aspek ini. Peran intelektual sendiri dapat digambarkan dengan para tokoh pemikir Indonesia atau figur-figur yang bergerak dalam diplomasi. Meskipun menekankan pentingnya peran intelektual, Geertz juga mengakui pentingnya keterlibatan massa rakyat dalam revolusi kemerdekaan.

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa peranan semua elemen dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan sesuatu sangat penting, dengan melibatkan semua elemen yang ada suatu hal akan ringan dicapai.

Terkait dengan topik ini terdapat juga sejarawan lain yang juga memberi beberapa tanggapan mengenai topik ini. Tokoh tersebut adalah George Kahin, yang juga pernah menjelaskan mengenai keterlibatan massa rakyat dalam revolusi Kemerdekaan Indonesia. Pada November-Desember 1945, menurut Kahin, pertempuran hebat terjadi hampir diseluruh Jawa serta beberapa wilayah di Sumatera dan Bali, meskipun yang paling hebat memang yang terjadi di Surabaya.

Peristiwa ini memperlihatkan kepada pasukan Inggris bahwa di balik gerakan massa yang dihadapi Inggris, terdapat tekad dan nyali untuk mengorbankan nyawanya.

Hal ini sekaligus menyadarkan pihak Inggris bahwa Republik Indonesia didukung oleh massa rakyat secara aktif (George McTurnan Kahin, 2013: 209).

Mengenai studi tentang Revolusi Indoensia, menurut Geertz, “tidak ada penjelasan sejarah yang tunggal”. Pendapat Geertz ini sangat menarik, karena memang perihal Revolusi Kemerdekaan Indonesia tak bisa hanya dilihat dan dijelaskan dari satu sudut pandang saja. Baik pemuda maupun kaum intelektual masing-masing memiliki peranannya. Apalagi jika kita sadari bahwa Revolusi Kemerdekaan Indonesia dilakukan baik melalui perjuangan fisik maupun diplomasi.

Sementara itu, peran perempuan dalam revolusi juga tak bisa dilupakan begitu saja dari narasi-narasi sejarah Indonesia. Banyak kelompok perempuan yang juga terlibat dalam Revolusi. Pada masa Revolusi banyak perempuan membentuk gerakan organisasi dalam bidang literasi dan aturan-aturan perkawinan, seperti aturan pernikahan, perceraian, poligami serta kaitannya dengan hukum-hukum agama Islam.

Pada masa revolusi kemerdekaan, perempuan-perempuan juga turut terlibat dan aktif dalam gerilya dan “perjuangan bawah tanah”. Mereka membantu para pejuang yang bertempur di garis depan. Segera sesudah proklamasi kemerdekaan, Palang Merah Indonesia (PMI) segera dibentuk, dan di situ para perempuan banyak berperan (Cora Vreede-De Stuers, 2008: 175). Mereka membentuk tim perawat, menjalankan dapur umum, dan klinik berjalan.

Selain dalam PMI, banyak perempuan terlibat dalam Revolusi Kemerdekaan melalui perkumpulan lain yang populer pada masa perjuangan yakni Perwani (Persatuan Wanita Negara Indonesia).

Dalam rangkaian narasi bergambar di bawah ini akan digambarkan beberapa pokok pikiran Geertz dalam konteks masa Revolusi Indonesia. Seperti dijelaskan diatas, pokok pikiran Geertz dalam buku ini diantaranya meliputi beragam hal seperti keberagaman atau kemajemukan Indonesia, semangat revolusi oleh pemuda, primordialisme, dan nasionalisme.



Hai Semua.
Saya Pak Banar sebagai Guru Sejarah.

Saya Dita, sebagai murid SMA.



Saya Danto, sebagai murid SMA.



CLIFFORD GEERTZ, adalah seorang Antropolog.
Gagasannya didalam komik :
Peranan kaum intelektual dalam revolusi Indonesia.



BENEDICT ANDERSON, adalah seorang sejarawan.
Gagasannya dalam komik :
Peranan para pemuda dalam Revolusi Indonesia.

Di suatu sekolah Menengah Atas.
Di dalam kelas, pelajaran sedang berlangsung...



Ya, masih ada 10 menit sebelum jam pelajaran usai.
Apakah ada pertanyaan
seputar sejarah Kemerdekaan Indonesia?





Tiba-tiba bel berbunyi, menandakan jam pelajaran usai.



Waduh bel sudah berbunyi.
Bagaimana kalau kita bahas saja di luar kelas?
Mari kita ke taman!









Menurutnya, revolusi Indonesia bukan semata-mata revolusi fisik. Revolusi tak akan pernah tercapai tanpa adanya keterlibatan dari kalangan-kalangan intelektual. Misalnya saat peristiwa Proklamasi. Saat terjadi kekosongan kekuasaan, kaum intelek inilah yang mengambil alih kekuasaan.



Jadi ada Nasionalisme Pemuda dan Nasionalisme elite terdidik.

Menurut Geertz, rasa Nasionalisme muncul karena diperolehnya pendidikan Barat.

Nasionalisme muncul sebagai kebutuhan bersama untuk melawan kolonialisme yang juga datang dari Barat.

Maka dari itu, Geertz meyakini bahwa aktor utama dalam revolusi Indonesia berasal dari para elite terdidik dengan segala usaha-usaha dan kemampuan diplomasinya.

Sedangkan menurut Ben, memang pendidikan memiliki peran penting. Namun selain pendidikan Barat, pendidikan tradisional juga memiliki pengaruh. Misalnya Pesantren.

Nasionalisme pemuda adalah nasionalisme yang pernah dengan sepenuh hati memperjuangkan "perjuangan" ketimbang mengharapkan diplomasi.

Bagaimana dengan peran perempuan di masa revolusi pak?



Gerakan awal perempuan pada awalnya bergerak dibidang literasi dan aturan-aturan mengenai pernikahan, perceraian, dan poligami.

Sedang pada saat perang Kemerdekaan, mereka yang terlibat dan aktif dalam perjuangan bawah tanah turut membantu yang berperang dengan menjadi bagian-bagian di Palang Merah dan siap ditugaskan di wilayah manapun.

Hari mulai gelap...



Sudah gelap nih, sampai disini dulu ya diskusi kita.
Ayo pada pulang.

Ingat, tentang berbagai studi mengenai revolusi
memang tidak ada penjelasan yang tunggal.

Baik pak, trimakasih untuk hari ini.



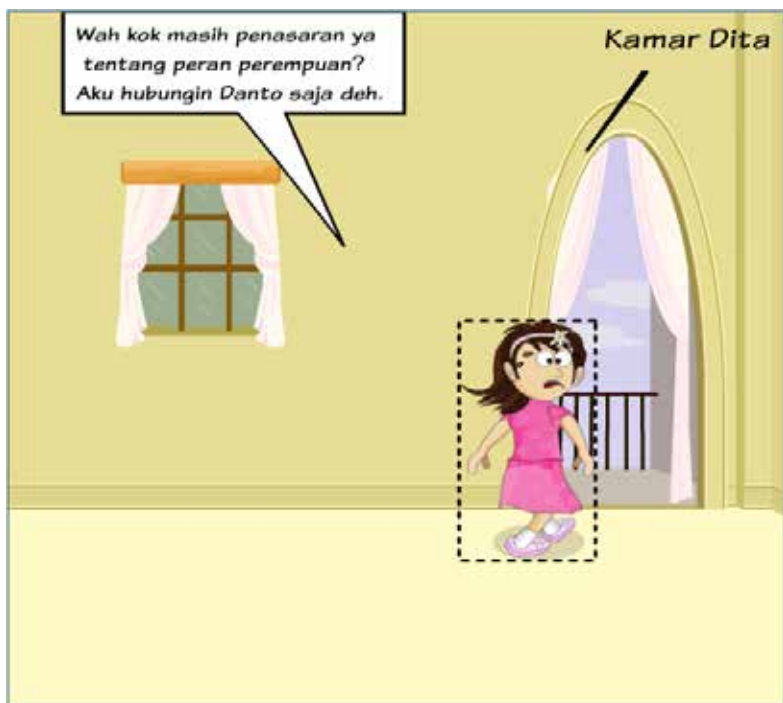
Pulang kerumah masing-masing.



Hmmm, ternyata peran perempuan sangat berdampak besar juga terhadap revolusi Indonesia.

Kamar Dita







Daftar Pustaka

- Anderson, Benedict Richard O'Gorman. (1988). *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kahin, George McTurnan. (1995). *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Solo: Sebelas Maret University Press.
- Wardaya, Baskara T. (2017). *Membangun Republik*. Yogyakarta: Galangpress.



Semula buku ini merupakan hasil penelitian bidang sejarah tentang sejauh mana visualisasi narasi dan pandangan sejarah membantu atau tidak membantu generasi muda —khususnya mahasiswa— dalam mempelajari sejarah Indonesia. ... dan kami menemukan bahwa kegiatan mem-visualisasi-kan topik-topik sejarah ternyata membantu memperkuat minat mahasiswa untuk belajar sejarah, khususnya sejarah Indonesia masa kolonial dan pasca-kolonial.

(Editor)

